



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Dalami Fakta Baru Dugaan Korupsi KPU

SELUMA - Sejumlah fakta baru ditemukan dalam persidangan dua terdakwa perkara dugaan korupsi anggaran KPU Seluma tahun 2018. Yakni Harmazan mantan Sekretaris KPU Seluma dan Anggi Angraini, mantan bendahara KPU Seluma di Pengadilan Negeri Bengkulu. Salah satunya adalah pengakuan dari Anggi Angraini jika banyak kegiatan fiktif di KPU Seluma. Pengakuan ini akan ditindak lanjuti oleh penyidik Unit Tipikor

Satreskrim Polres Seluma. Kapolres Seluma, AKBP I Nyoman Nertha Dana, SIK mengatakan bahwa sejumlah fakta baru yang ditemukan selama jalannya persidangan akan dijadikan petunjuk guna proses penyelidikan selanjutnya. Semua keterangan yang menjadi fakta baru baik dari terdakwa maupun para saksi akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Kemungkinan fakta-fakta itu merupakan akibat dari adanya penyelewangan

pembayaran gaji PPK dan PPS yang saat ini masih menjadi fokus utama dari penyidik Polres Seluma.

"Untuk fakta terbaru dalam persidangan akan dijadikan bahan penyelidikan selanjutnya, sementara ini pengusutannya masih tetap berlanjut," tuturnya.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya atau kasus lainnya yang terbongkar dalam pengusutan dugaan korupsi KPU Seluma ini. Namun hal itu masih

belum bisa dipastikan karena fakta-fakta dalam persidangan itu masih harus diselidiki dan didalami terlebih dahulu. Mengenai pengakuan terdakwa, Kapolres masih mau berkomentar banyak. Menurutnya apapun yang disampaikan oleh terdakwa dalam persidangan harus tetap ditelusuri dan dikembangkan terlebih dahulu.

"Kita lihat terlebih dahulu, tentunya setiap fakta-fakta baru itu akan kita kumpulkan," tutupnya.

Kembali mengingatkan, ka-

sus dugaan korupsi anggaran KPU Seluma tahun 2018 lalu mengakibatkan kerugian negara (KN) sebesar Rp 1,4 miliar dari total anggaran Rp 21 miliar. KN tersebut Rp 500 juta merupakan gaji PPK dan PPS di tiga kecamatan yakni Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Semidang Alas dan Kecamatan Ulu Talo yang tak dibayar Sekretariat KPU. Sementara Rp 900 juta merupakan penyelewengan pada anggaran pengadaan barang dan jasa di tahun 2018. (cup)